



# **BUPATI SAMBAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 adalah dengan rincian sebagai berikut :

##### 1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	1.558.558.548.398,47	
b. Bertambah	Rp	107.288.700.424,40 (+)	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.665.847.248.822,87	

2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1.578.285.207.79375	
b. Bertambah	Rp	120.815.761.242,66	(+)
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.699.100.969.036,41	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	-33.253.720.213,54	

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	90.962.542.851,33	
2) Berkurang	Rp	3.469.822.637,79	(-)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	87.492.720.213,54	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	71.235.883.456,05	
2) Berkurang	Rp	16.996.883.456,05	(-)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	54.239.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	33.253.720.213,54	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	101.855.082.663,67	
2) Bertambah	Rp	14.087.575.943,40	(+)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	115.942.658.607,07	
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	1.253.934.491.000,00	
2) Bertambah	Rp	87.450.489.000,00	(+)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp	1.341.384.980.000,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	202.768.974.734,80	
2) Bertambah	Rp	5.750.635.481,00	(+)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	208.519.610.215,80	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	19.146.771.460,67	
2) Bertambah	Rp	2.413.681.323,39	(+)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	21.560.452.784,06	
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	5.344.600.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	(+)
Jumlah Retribusi Daerah setelah	Rp	5.344.600.000,00	

perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	3.683.872.859,00	
2) Berkurang	Rp	<u>76.482.990,00</u>	(-)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		3.607.389.869,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	73.679.838.344,00	
2) Bertambah	Rp	<u>11.750.377.610,01</u>	(+)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp		85.430.215.954,01

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	27.019.364.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp		27.019.364.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	882.308.489.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>11.057.581.000,00</u>	(-)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp		871.250.908.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	344.606.638.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>98.508.070.000,00</u>	(+)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp		443.114.708.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>300.000.000,00</u>	(+)
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		300.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp		0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp	49.077.387.158,00	
2) Bertambah	Rp	<u>5.450.635.481,00</u>	(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp		54.528.022.639,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	153.419.765.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp		153.419.765.000,00

e. Bagi Hasil Sumbangan Pihak III Provinsi

1) Semula	Rp	271.822.576,80	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Bagi Hasil Sumbangan Pihak III Provinsi setelah perubahan	Rp		271.822.576,80

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	938.327.776.389,80	
2) Berkurang	Rp	<u>39.981.316.183,54</u>	(-)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp		898.346.460.206,26

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	639.957.431.403,95	
2) Bertambah	Rp	<u>160.797.077.426,20</u>	(+)
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp		800.754.508.830,15

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	671.701.688.943,73	
2) Berkurang	Rp	<u>40.768.066.183,54</u>	(-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		630.933.622.760,19

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>1.071.650.000,00</u>	(-)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp		928.350.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	13.967.400.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>2.314.400.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp		16.281.800.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	1.857.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>695.000.000,00</u>	(-)
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		1.162.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	2.449.137.146,07	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah	Rp		2.449.137.146,07

perubahan

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	245.352.550.300,00	
2) Bertambah	Rp	239.000.000,00	(+)
Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp 245.591.550.300,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	(+)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	49.179.345.042,00	
2) Bertambah	Rp	9.187.537.020,00	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 58.366.882.062,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	289.818.869.253,66	
2) Bertambah	Rp	109.455.624.380,20	(+)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp 399.274.493.633,86

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	300.959.217.108,29	
2) Bertambah	Rp	42.153.916.026,00	(+)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp 343.113.133.134,29

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	90.962.542.851,33	
2) Berkurang	Rp	3.469.822.637,79	(-)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 87.492.720.213,54

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	71.235.883.456,05	
2) Berkurang	Rp	16.996.883.456,05	(-)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 54.239.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	21.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	8.469.822.637,79	(-)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan			Rp 12.530.177.362,21

b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00 (+)	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00 (+)	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	69.962.542.851,33	
2) Bertambah	Rp	5.000.000.000,00 (+)	
Jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp 74.962.542.851,33
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
			Rp 0,00
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00 (+)	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
			Rp 0,00
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00 (+)	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00 (+)	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00 (+)	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp	71.235.883.456,05	
2) Berkurang	Rp	16.996.883.456,05 (-)	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp 54.239.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00 (+)	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00

e. Pembayaran kegiatan belanja

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00 (+)	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

Halaman : 1-15

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.558.558.548.398,47</b>	<b>1.665.847.248.822,87</b>	<b>107.288.700.424,40</b>	<b>6,88</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>101.855.082.663,67</b>	<b>115.942.658.607,07</b>	<b>14.087.575.943,40</b>	<b>13,83</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>19.146.771.460,67</b>	<b>21.560.452.784,06</b>	<b>2.413.681.323,39</b>	<b>12,61</b>
<b>4.1.1.01.</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>419.312.768,14</b>	<b>442.350.500,00</b>	<b>32.037.731,86</b>	<b>7,81</b>
4.1.1.01.01.	Hotel	419.312.768,14	442.350.500,00	32.037.731,86	7,81
<b>4.1.1.02.</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>1.850.000.000,00</b>	<b>1.943.650.380,00</b>	<b>93.650.380,00</b>	<b>5,06</b>
4.1.1.02.01.	Restoran	1.850.000.000,00	1.943.650.380,00	93.650.380,00	5,06
<b>4.1.1.03.</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>61.036.400,00</b>	<b>65.500.000,00</b>	<b>4.463.600,00</b>	<b>7,31</b>
4.1.1.03.01.	Hiburan	61.036.400,00	65.500.000,00	4.463.600,00	7,31
<b>4.1.1.04.</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>390.835.489,75</b>	<b>479.200.500,00</b>	<b>88.365.010,25</b>	<b>22,61</b>
4.1.1.04.01.	Reklame	390.835.489,75	479.200.500,00	88.365.010,25	22,61
<b>4.1.1.05.</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>8.501.285.768,80</b>	<b>10.674.570.713,00</b>	<b>2.173.284.944,20</b>	<b>25,56</b>
4.1.1.05.01.	Penerangan Jalan	8.501.285.768,80	10.674.570.713,00	2.173.284.944,20	25,56
<b>4.1.1.06.</b>	<b>Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.1.06.01.	Mineral Bukan Logam Dan Batuan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	
<b>4.1.1.07.</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>16.700.342,92</b>	<b>38.580.000,00</b>	<b>21.879.657,08</b>	<b>131,01</b>
4.1.1.07.01.	Parkir	16.700.342,92	38.580.000,00	21.879.657,08	131,01
<b>4.1.1.09.</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>16.600.691,06</b>	<b>16.600.691,06</b>	<b>0,00</b>	
4.1.1.09.01.	Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	16.600.691,06	16.600.691,06	0,00	
<b>4.1.1.10.</b>	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>3.550.000.000,00</b>	<b>3.550.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.1.10.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	0,00	
<b>4.1.1.11.</b>	<b>Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.1.11.01.	Pajak Bumi Dan Bagunan (PBB) Sektor P-2	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
<b>4.1.2.</b>	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>5.344.600.000,00</b>	<b>5.344.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.1.2.01.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>2.091.850.000,00</b>	<b>2.091.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	785.000.000,00	785.000.000,00	0,00	
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	178.000.000,00	178.000.000,00	0,00	
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.2.01.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	
4.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
<b>4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.178.500.000,00</b>	<b>1.178.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
6.1.4.	<b>PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH</b>	69.962.542.851,33	74.962.542.851,33	5.000.000.000,00	7,15
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	69.962.542.851,33	74.962.542.851,33	5.000.000.000,00	7,15
6.1.4.03.01.	Bank Pembangunan Daerah (Bank Kalbar)	69.962.542.851,33	74.962.542.851,33	5.000.000.000,00	7,15
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	90.962.542.851,33	87.492.720.213,54	(3.469.822.637,79)	(3,81)
6.2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	71.235.883.456,05	54.239.000.000,00	(16.996.883.456,05)	(23,86)
6.2.3.	<b>PEMBAYARAN POKOK UTANG</b>	71.235.883.456,05	54.239.000.000,00	(16.996.883.456,05)	(23,86)
6.2.3.07.	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	71.235.883.456,05	54.239.000.000,00	(16.996.883.456,05)	(23,86)
6.2.3.07.01.	Bank KALBAR	71.235.883.456,05	54.239.000.000,00	(16.996.883.456,05)	(23,86)
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	71.235.883.456,05	54.239.000.000,00	(16.996.883.456,05)	(23,86)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	19.726.659.395,28	33.253.720.213,54	13.527.060.818,26	68,57
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		0,00	0,00	

BUPATI SAMBAS

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

Halaman : 1-2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.558.558.548.398,47	1.665.847.248.822,87	107.288.700.424,40	6,88
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.855.082.663,67	115.942.658.607,07	14.087.575.943,40	13,83
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	19.146.771.460,67	21.560.452.784,06	2.413.681.323,39	12,61
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	5.344.600.000,00	5.344.600.000,00	0,00	
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.683.872.859,00	3.607.389.869,00	(76.482.990,00)	(2,08)
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	73.679.838.344,00	85.430.215.954,01	11.750.377.610,01	15,95
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.253.934.491.000,00	1.341.384.980.000,00	87.450.489.000,00	6,97
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/HASIL BUKAN PAJAK	27.019.364.000,00	27.019.364.000,00	0,00	
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	882.308.489.000,00	871.250.908.000,00	(11.057.581.000,00)	(1,25)
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	344.606.638.000,00	443.114.708.000,00	98.508.070.000,00	28,59
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.768.974.734,80	208.519.610.215,80	5.750.635.481,00	2,84
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH		300.000.000,00	300.000.000,00	
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	49.077.387.158,00	54.528.022.639,00	5.450.635.481,00	11,11
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	153.419.765.000,00	153.419.765.000,00	0,00	
4.3.7.	BAGI HASIL SUMBANGAN PIHAK III PROPINSI	271.822.576,80	271.822.576,80	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.558.558.548.398,47	1.665.847.248.822,87	107.288.700.424,40	6,88
5.	BELANJA DAERAH	1.578.285.207.793,75	1.699.100.969.036,41	120.815.761.242,66	7,65
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	938.327.776.389,80	898.346.460.206,26	(39.981.316.183,54)	(4,26)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	671.701.688.943,73	630.933.622.760,19	(40.768.066.183,54)	(6,07)
5.1.2.	BELANJA BUNGA	2.000.000.000,00	928.350.000,00	(1.071.650.000,00)	(53,58)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	13.967.400.000,00	16.281.800.000,00	2.314.400.000,00	16,57
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.857.000.000,00	1.162.000.000,00	(695.000.000,00)	(37,43)
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	2.449.137.146,07	2.449.137.146,07	0,00	
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	245.352.550.300,00	245.591.550.300,00	239.000.000,00	0,10
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	639.957.431.403,95	800.754.508.830,15	160.797.077.426,20	25,13
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.179.345.042,00	58.366.882.062,00	9.187.537.020,00	18,68
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	289.818.869.253,66	399.274.493.633,86	109.455.624.380,20	37,77
5.2.3.	BELANJA MODAL	300.959.217.108,29	343.113.133.134,29	42.153.916.026,00	14,01
	JUMLAH BELANJA	1.578.285.207.793,75	1.699.100.969.036,41	120.815.761.242,66	7,65
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.726.659.395,28)	(33.253.720.213,54)	(13.527.060.818,26)	68,57

1	2	3	4	5	6
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	19.726.659.395,28	33.253.720.213,54	13.527.060.818,26	68,57
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	90.962.542.851,33	87.492.720.213,54	(3.469.822.637,79)	(3,81)
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	21.000.000.000,00	12.530.177.362,21	(8.469.822.637,79)	(40,33)
6.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	69.962.542.851,33	74.962.542.851,33	5.000.000.000,00	7,15
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90.962.542.851,33	87.492.720.213,54	(3.469.822.637,79)	(3,81)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	71.235.883.456,05	54.239.000.000,00	(16.996.883.456,05)	(23,86)
6.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	71.235.883.456,05	54.239.000.000,00	(16.996.883.456,05)	(23,86)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	71.235.883.456,05	54.239.000.000,00	(16.996.883.456,05)	(23,86)
	PEMBIAYAAN NETTO	19.726.659.395,28	33.253.720.213,54	13.527.060.818,26	68,57
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		0,00	0,00	

BUPATI SAMBAS

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR 7 TAHUN 2017  
 TANGGAL 13 OKTOBER 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN SAMBAS  
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2017

GOLONGAN/ RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	2	0	0	0	0	0	2
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/c	0	21	0	0	0	0	21
Golongan IV/b	0	3	51	0	40	4	98
Golongan IV/a	0	0	73	28	2076	9	2186
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>124</b>	<b>28</b>	<b>2096</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
Golongan III/d	0	0	30	263	517	13	823
Golongan III/c	0	0	0	177	411	33	621
Golongan III/b	0	0	0	52	611	209	872
Golongan III/a	0	0	0	1	643	268	912
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>493</b>	<b>1553</b>	<b>548</b>	<b>81</b>
Golongan II/d	0	0	0	0	154	132	286
Golongan II/c	0	0	0	0	62	361	423
Golongan II/b	0	0	0	0	9	124	133
Golongan II/a	0	0	0	0	3	177	180
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>125</b>	<b>14</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/c	0	0	0	0	0	20	20
Golongan I/b	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/a	0	0	0	0	0	2	2
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>154</b>	<b>521</b>	<b>4526</b>	<b>1362</b>	<b>6589</b>

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
07.1.02.	KESEHATAN	183.268.766.331,09	190.902.020.757,10	7.633.234.426,01	4,17
08.	Pariwisata dan Budaya	6.181.061.880,94	7.839.681.880,94	1.658.620.000,00	26,83
08.2.16.	KEBUDAYAAN	857.061.600,00	1.967.061.600,00	1.110.000.000,00	129,51
08.3.02.	PARIWISATA	5.324.000.280,94	5.872.620.280,94	548.620.000,00	10,30
09.	Agama	-	-	-	-
10.	Pendidikan	39.710.820.288,42	125.180.697.288,42	85.469.877.000,00	215,23
10.1.01.	PENDIDIKAN	39.710.820.288,42	125.180.697.288,42	85.469.877.000,00	215,23
11.	Perlindungan Sosial	1.947.165.478,48	2.288.646.478,48	341.481.000,00	17,54
11.1.06.	SOSIAL	1.947.165.478,48	2.288.646.478,48	341.481.000,00	17,54
<b>JUMLAH</b>		<b>639.957.431.403,95</b>	<b>800.754.508.830,15</b>	<b>160.797.077.426,20</b>	<b>25,13</b>

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN  
 KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM  
 KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
 Tahun Anggaran 2017

Hal 1 dari 2

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
<b>01.</b>	<b>Pelayanan Umum</b>	<b>92.790.954.295,93</b>	<b>108.290.465.996,12</b>	<b>15.499.511.700,19</b>	<b>16,70</b>
01.2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.066.850.691,84	3.070.350.691,84	3.500.000,00	0,11
01.2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.134.027.374,09	4.849.127.374,09	1.715.100.000,00	54,73
01.2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.561.700.000,00	1.602.619.000,00	40.919.000,00	2,62
01.2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.136.242.500,00	2.225.866.000,00	89.623.500,00	4,20
01.2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.067.331.700,11	2.712.731.700,11	645.400.000,00	31,22
01.2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.865.595.000,00	5.703.075.000,00	837.480.000,00	17,21
01.2.14.	STATISTIK	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00
01.2.17.	PERPUSTAKAAN	756.367.276,50	887.867.276,50	131.500.000,00	17,39
01.2.18.	KEARSIPAN	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-
01.3.08.	TRANSMIGRASI	276.000.000,00	426.000.000,00	150.000.000,00	54,35
01.4.01.	PERENCANAAN	3.602.788.930,32	4.009.638.930,32	406.850.000,00	11,29
01.4.02.	KEUANGAN	10.465.024.661,09	11.843.420.411,28	1.378.395.750,19	13,17
01.4.03.	KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.711.207.299,68	6.426.513.999,68	715.306.700,00	12,52
01.4.04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.442.000.000,00	1.533.400.000,00	91.400.000,00	6,34
01.4.05.	PEMERINTAHAN UMUM	53.515.818.862,30	62.784.855.612,30	9.269.036.750,00	17,32
<b>02.</b>	<b>Pertahanan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.</b>	<b>Ketertiban dan ketentraman</b>	<b>2.739.674.962,96</b>	<b>3.511.174.962,96</b>	<b>771.500.000,00</b>	<b>28,16</b>
03.1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.739.674.962,96	3.511.174.962,96	771.500.000,00	28,16
<b>04.</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>296.951.888.251,56</b>	<b>342.315.380.601,56</b>	<b>45.363.492.350,00</b>	<b>15,28</b>
04.1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	215.929.921.110,04	246.748.693.160,04	30.818.772.050,00	14,27
04.2.01.	TENAGA KERJA	2.140.017.839,75	3.490.010.539,75	1.349.992.700,00	63,06
04.2.03.	PANGAN	1.535.556.700,00	1.461.856.700,00	(73.700.000,00)	(4,80)
04.2.09.	PERHUBUNGAN	25.625.512.761,73	33.545.812.761,73	7.920.300.000,00	30,91
04.2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.707.600.390,04	3.090.200.390,04	382.600.000,00	14,13
04.2.12.	PENANAMAN MODAL	2.050.000.000,00	2.051.900.000,00	1.900.000,00	0,09
04.3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.430.757.500,00	10.430.477.500,00	3.999.720.000,00	62,20
04.3.03.	PERTANIAN	26.445.939.800,00	27.205.639.800,00	759.700.000,00	2,87
04.3.04.	KEHUTANAN	140.631.950,00	140.631.950,00	-	-
04.3.06.	PERDAGANGAN	12.228.200.200,00	12.332.407.800,00	104.207.600,00	0,85
04.3.07.	PERINDUSTRIAN	1.717.750.000,00	1.817.750.000,00	100.000.000,00	5,82
<b>05.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>10.753.451.700,00</b>	<b>11.093.451.700,00</b>	<b>340.000.000,00</b>	<b>3,16</b>
05.2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	10.753.451.700,00	11.093.451.700,00	340.000.000,00	3,16
<b>06.</b>	<b>Perumahan dan fasilitas umum</b>	<b>5.613.628.214,57</b>	<b>9.332.989.164,57</b>	<b>3.719.360.950,00</b>	<b>66,26</b>
06.1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.613.628.214,57	9.332.989.164,57	3.719.360.950,00	66,26
<b>07.</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>183.268.786.331,09</b>	<b>190.902.020.757,10</b>	<b>7.633.234.426,01</b>	<b>4,17</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ( AUDITED )**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 dan 2015

*(dalam rupiah)*

No. Urut	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2016	%	Realisasi Tahun 2015
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>1.577.065.409.811,55</b>	<b>1.530.823.553.222,48</b>	<b>97,07</b>	<b>1.401.587.116.678,57</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>98.893.625.880,02</b>	<b>102.059.036.354,48</b>	<b>103,20</b>	<b>85.577.887.780,47</b>
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	16.379.550.937,74	20.463.309.079,37	124,93	14.185.509.904,20
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.722.237.000,00	3.258.019.202,75	69,01	5.592.778.612,33
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.683.872.859,00	3.683.872.859,00	100,00	2.872.113.015,76
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	74.107.965.083,28	74.652.835.213,36	100,74	62.927.486.248,18
<b>1.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>1.476.649.961.354,73</b>	<b>1.427.827.928.868,00</b>	<b>96,69</b>	<b>1.314.661.752.457,00</b>
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	1.291.997.864.000,00	1.243.434.973.577,00	96,24	997.110.436.163,00
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak - LRA	24.490.604.000,00	29.334.220.829,00	119,78	23.648.700.350,00
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.705.433.000,00	1.233.328.500,00	45,59	6.114.275.813,00
1.2.1.03.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	882.308.489.000,00	882.308.489.000,00	100,00	793.128.760.000,00
1.2.1.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	382.493.338.000,00	330.558.935.248,00	86,42	174.218.700.000,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	119.850.177.000,00	119.850.177.000,00	100,00	235.468.714.000,00
1.2.2.03.	Dana Penyesuaian - LRA	119.850.177.000,00	119.850.177.000,00	100,00	235.468.714.000,00
1.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	49.938.520.354,73	49.679.378.291,00	99,48	58.332.202.294,00
1.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	49.938.520.354,73	49.679.378.291,00	99,48	58.332.202.294,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan - LRA	14.863.400.000,00	14.863.400.000,00	100,00	23.750.400.000,00
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	14.863.400.000,00	14.863.400.000,00	100,00	23.750.400.000,00
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>1.521.822.576,80</b>	<b>936.588.000,00</b>	<b>61,54</b>	<b>1.347.476.441,10</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah - LRA	1.250.000.000,00	936.588.000,00	74,93	1.049.860.800,00
1.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	1.250.000.000,00	936.588.000,00	74,93	1.049.860.800,00
1.3.3.	Pendapatan Lainnya - LRA	271.822.576,80	-	-	297.615.641,10
1.3.3.01.	Pendapatan Lainnya - LRA	271.822.576,80	-	-	297.615.641,10
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.449.252.287.021,37</b>	<b>1.374.425.040.042,12</b>	<b>94,84</b>	<b>1.282.320.132.589,16</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.089.824.328.112,34</b>	<b>1.046.373.540.252,87</b>	<b>96,01</b>	<b>983.905.633.863,16</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	695.450.554.802,49	674.519.731.066,42	96,99	630.851.550.600,09
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	381.161.045.969,59	360.671.959.685,53	94,62	296.298.128.097,10
2.1.3.	Belanja Bunga	1.180.727.340,26	429.691.888,92	36,39	278.736.370,97
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	10.032.000.000,00	9.811.347.312,00	97,80	55.787.018.795,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	940.810.300,00	47,04	690.200.000,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>358.427.958.909,03</b>	<b>327.918.328.127,37</b>	<b>91,49</b>	<b>298.349.318.975,00</b>
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	11.017.669.000,00	7.546.737.260,00	68,50	11.276.505.851,00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.439.841.850,85	42.951.110.332,00	90,54	38.581.925.645,00
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.813.966.799,00	79.847.695.005,87	83,34	85.145.906.174,00
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	203.528.048.109,18	196.949.333.954,50	96,77	161.024.932.680,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	628.433.150,00	623.451.575,00	99,21	2.320.048.625,00
<b>2.3.</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>133.171.661,88</b>	<b>13,32</b>	<b>65.179.751,00</b>
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	133.171.661,88	13,32	65.179.751,00
<b>3.</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>215.710.049.893,77</b>	<b>214.794.076.637,72</b>	<b>99,58</b>	<b>139.565.268.768,30</b>
<b>3.1.</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>2.110.178.793,77</b>	<b>1.691.514.983,00</b>	<b>80,16</b>	<b>1.527.174.321,00</b>
3.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.110.178.793,77	1.691.514.983,00	80,16	1.527.174.321,00
<b>3.2.</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>213.599.871.100,00</b>	<b>213.102.561.654,72</b>	<b>99,77</b>	<b>138.038.094.447,30</b>
3.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	212.749.871.100,00	212.335.780.964,00	99,81	137.380.834.904,00
3.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	850.000.000,00	766.780.690,72	90,21	657.259.543,30
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1.664.962.336.915,14</b>	<b>1.589.219.116.679,84</b>	<b>95,45</b>	<b>1.421.885.401.357,46</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(87.896.927.103,59)</b>	<b>(58.395.563.457,36)</b>	<b>66,44</b>	<b>(20.298.284.678,89)</b>
<b>4.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>87.896.927.103,59</b>	<b>70.925.740.819,57</b>	<b>80,69</b>	<b>81.459.328.326,43</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>132.396.927.103,59</b>	<b>115.422.740.819,57</b>	<b>87,18</b>	<b>110.047.161.255,43</b>
4.1.1.	Penggunaan SILPA	61.161.043.647,54	61.183.390.819,57	100,04	67.526.103.255,43
4.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
4.1.3.	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
4.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	71.235.883.456,05	54.239.000.000,00	76,14	42.497.000.000,00
4.1.5.	Penerimaan Kembali Piutang	-	350.000,00	-	24.058.000,00
4.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-
4.1.7.	Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-
4.1.8.	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-

No. Urut	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2016	%	Realisasi Tahun 2015
4.2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>44.500.000.000,00</b>	<b>44.497.000.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>28.587.832.929,00</b>
4.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
4.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
4.2.3.	<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri</b>	<b>42.500.000.000,00</b>	<b>42.497.000.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>28.587.832.929,00</b>
4.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
4.2.5.	<b>Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.6.	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-
4.2.7.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
	<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>	<b>-</b>	<b>12.530.177.362,21</b>	<b>-</b>	<b>61.161.043.647,54</b>

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**

**NERACA DAERAH ( AUDITED )**

Per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	2016	2015
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas di Kas Daerah	9.712.570.748,52	56.037.104.672,91
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	9.562.700,00	11.026.293,51
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
6	Kas di Bendahara BLUD	2.808.043.913,69	5.112.912.681,12
7	Kas di Bendahara BOS	5.275.360.034,00	-
8	Investasi Jangka Pendek	-	-
9	Piutang Pajak Daerah	11.864.352.646,00	10.216.304.056,00
10	Penyisihan Piutang	(6.316.162.739,95)	(5.174.248.218,52)
11	Piutang Pajak Netto	5.548.189.906,05	5.042.055.837,48
12	Piutang Retribusi Daerah	2.711.148.506,00	2.771.102.855,00
13	Penyisihan Piutang	(1.634.249.679,88)	(1.303.182.436,72)
14	Piutang Retribusi Netto	1.076.898.826,12	1.467.920.418,28
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	257.819.141,78	120.573.500,00
16	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(120.573.500,00)	(120.573.500,00)
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	137.245.641,78	-
18	Piutang Lainnya	14.914.212.222,06	20.620.043.552,00
19	Penyisihan Piutang Lainnya	(66.165.309,99)	(37.849.791,35)
20	Piutang Lainnya Netto	14.848.046.912,07	20.582.193.760,65
21	Belanja Dibayar Dimuka	250.399.983,28	210.948.979,57
22	Persediaan	17.078.551.750,08	12.299.780.940,28
23	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>56.744.870.418,59</b>	<b>100.763.943.583,81</b>
24	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
25	<b>Investasi Non Permanen</b>		
26	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
27	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
28	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
29	Investasi Non Permanen Lainnya	29.573.610,83	29.573.610,83
30	<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>29.573.610,83</b>	<b>29.573.610,83</b>
31	<b>Investasi Permanen</b>		
32	Penyertaan Modal Pemda	34.396.260.644,65	33.178.687.893,65
33	Investasi Permanen Lainnya	-	-
34	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>34.396.260.644,65</b>	<b>33.178.687.893,65</b>
35	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>34.425.834.255,48</b>	<b>33.208.261.504,48</b>
36	<b>ASET TETAP</b>		
37	Tanah	126.777.345.855,69	121.127.609.394,96
38	Peralatan dan Mesin	328.497.417.240,51	282.957.249.495,85
39	Gedung dan Bangunan	872.923.434.105,51	754.124.907.777,23
40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.654.351.156.655,62	1.454.737.806.788,22
41	Aset Tetap Lainnya	57.105.770.618,40	51.632.994.883,15
42	Konstruksi dalam Pengerjaan	28.763.433.895,60	21.080.347.338,40
43	Akumulasi Penyusutan	(1.031.908.850.506,77)	(902.693.942.967,56)
44	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2.036.509.707.864,86</b>	<b>1.782.966.972.710,25</b>
45	<b>DANA CADANGAN</b>		
46	Dana Cadangan	-	-
47	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		
48	<b>ASET LAINNYA</b>		
49	Tagihan Penjualan Angsuran	7.787.540,00	10.498.340,00
50	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
51	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	7.787.540,00	10.498.340,00
52	Aset Tak Berwujud	1.562.575.312,00	1.288.336.412,00
53	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.039.034.284,00)	(663.525.456,00)
54	Aset Tak Berwujud Netto	523.541.028,00	624.810.956,00
55	Aset Lain-Lain	35.325.067.853,23	37.553.848.131,41
56	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>35.856.396.421,23</b>	<b>38.189.157.427,41</b>
57	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.163.536.808.956,86</b>	<b>1.955.128.335.225,94</b>

No	Uraian	2016	2015
58	<b>KEWAJIBAN</b>		
59	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-
61	Utang Bunga		-
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-
63	Pendapatan Diterima Dimuka	114.569.004,71	84.165.752,47
64	Utang Belanja	1.834.838.550,00	-
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	64.454.905.265,45	46.433.155.664,23
66	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>66.404.312.820,16</b>	<b>46.517.321.416,70</b>
67	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
68	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		
69	Pendapatan Diterima Dimuka		
70	Utang Jangka Panjang Lainnya		
71	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		-
72	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>66.404.312.820,16</b>	<b>46.517.321.416,70</b>
87	<b>EKUITAS</b>		
89	Ekuitas	2.097.132.496.136,70	1.908.611.013.809,24
90	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.097.132.496.136,70</b>	<b>1.908.611.013.809,24</b>
91	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>2.163.536.808.956,86</b>	<b>1.955.128.335.225,94</b>

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR 7 TAHUN 2017  
 TANGGAL 13 OKTOBER 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017

Hal 1 dari 193

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berambah/ (Berkurang)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	Jumlah 6=3+4+5	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	Jumlah 10=7+8+9	11=10-6			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12		
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	28.294.300.242,00	179.777.136.596,07	244.136.559.547,49	449.209.996.385,56	37.713.512.262,00	267.822.140.974,08	272.428.568.575,49	577.964.221.811,57	128.754.225.426,01	28,66		
1.01.	PENDIDIKAN	5.679.393.000,00	15.185.380.288,42	18.846.047.000,00	39.710.820.288,42	17.708.370.000,00	64.005.402.288,42	43.466.924.900,00	125.180.697.288,42	85.469.877.000,00	215,23		
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.679.393.000,00	15.185.380.288,42	18.846.047.000,00	39.710.820.288,42	17.708.370.000,00	64.005.402.288,42	43.466.924.900,00	125.180.697.288,42	85.469.877.000,00	215,23		
1.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi	938.790.000,00	2.903.784.678,00	0,00	3.842.574.678,00	944.890.000,00	2.999.722.678,00	0,00	3.844.612.678,00	2.038.000,00	0,05		
1.01.01.01.01.	Perkantoran	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	261.291.320,00	0,00	261.291.320,00	0,00	261.291.320,00	0,00	261.291.320,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	208.080.800,00	0,00	0,00	208.080.800,00	208.080.000,00	0,00	0,00	208.080.800,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	27.682.500,00	0,00	27.682.500,00	0,00	27.682.500,00	0,00	27.682.500,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	119.718.600,00	0,00	119.718.600,00	0,00	119.718.600,00	0,00	119.718.600,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.100.	Operasional UPT Dinas Pendidikan	15.000.000,00	75.506.800,00	0,00	90.506.800,00	15.000.000,00	75.506.800,00	0,00	90.506.800,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.101.	Sambas	6.000.000,00	59.862.000,00	0,00	65.862.000,00	6.000.000,00	59.862.000,00	0,00	65.862.000,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.101.	Operasional UPT Dinas Pendidikan	6.000.000,00	59.862.000,00	0,00	65.862.000,00	6.000.000,00	59.862.000,00	0,00	65.862.000,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.102.	Silangkung	9.000.000,00	79.276.800,00	0,00	88.276.800,00	9.000.000,00	81.676.800,00	0,00	90.676.800,00	2.400.000,00	2,72		
1.01.01.01.103	Operasional UPT Dinas Pendidikan Paloh Keramat	6.000.000,00	52.930.000,00	0,00	58.930.000,00	6.000.000,00	52.930.000,00	0,00	58.930.000,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.104.	Operasional UPT Dinas Pendidikan Salingan Besar	3.000.000,00	43.206.500,00	0,00	46.206.500,00	3.000.000,00	43.206.500,00	0,00	46.206.500,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.105.	Operasional UPT Dinas Pendidikan Galing	6.000.000,00	49.737.000,00	0,00	55.737.000,00	6.000.000,00	49.737.000,00	0,00	55.737.000,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.106.	Operasional UPT Dinas Pendidikan Suteah	6.000.000,00	49.743.000,00	0,00	55.743.000,00	6.000.000,00	49.743.000,00	0,00	55.743.000,00	0,00	0,00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Jenis Belanja		Jumlah	Jenis Belanja		Jumlah	(Rp)	%					
3	4	5	6=3+4+5		7	8				9	10=7+8+9	11=10-6	12	
1	2	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal										

BUPATI SAMBAS,

td.

ATBAH ROMIN SUHALI

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**Tahun Anggaran 2017**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - PENDIDIKAN  
 ORGANISASI : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang		%	DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	5 = 4 - 3		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	5	7	
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH			0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO			0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.	Jumlah Pendapatan	514.073.984.398,93	579.720.989.607,69	65.647.005.208,76	12,77		
1.01.1.01.01.00.00.9.	BELANJA DAERAH	514.073.984.398,93	579.720.989.607,69	65.647.005.208,76	12,77		
	BEBAN						
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	473.506.102.510,51	452.573.230.719,27	(20.932.871.791,24)	(4,42)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	473.506.102.510,51	452.573.230.719,27	(20.932.871.791,24)	(4,42)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	455.271.117.600,22	440.302.448.469,27	(14.968.669.130,95)	(3,29)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Ulang Representasi	231.199.038.361,29	224.954.123.892,35	(6.244.914.468,94)	(2,70)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	21.707.596.778,70	19.870.425.339,91	(1.837.171.438,79)	(8,46)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	454.105.800,00	401.075.000,00	(53.030.800,00)	(11,68)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	20.480.474.000,00	18.684.644.000,00	(1.795.830.000,00)	(8,77)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.254.979.300,00	944.947.000,00	(310.032.300,00)	(24,70)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	12.876.178.000,00	10.782.332.810,40	(2.093.845.189,60)	(16,26)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	666.954.526,28	70.448.230,00	(596.506.296,28)	(89,44)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembuatan Gaji	167.713.814,00	50.713.814,00	(117.000.000,00)	(69,76)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	8.061.832.119,95	6.388.774.459,61	(1.673.057.666,34)	(20,75)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	644.946.600,00	527.665.629,00	(117.280.971,00)	(18,18)		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kesehatan	806.183.300,00	676.183.300,00	(130.000.000,00)	(16,13)		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAIL

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

LAMPIRAN II.b PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR 7 TAHUN 2017  
 TANGGAL 13 OKTOBER 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman : 1

Kode	Ususan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja							
		Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah/ (Berkurang) Rp		Tidak Langsung Rp	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / (Berkurang) Rp		
				Rp	%		Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp	Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7-8	10	11	12=10-11	13=12-9	14
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	66.387.045.755,25	78.102.423.365,26	11.715.377.610,01	17,85	559.453.941.063,29	461.779.941.151,27	1.021.233.892.214,56	592.111.423.587,85	591.725.085.577,28	1.123.836.509.165,13	102.802.626.950,57	10,05
1.01.	PENDIDIKAN					473.506.102.510,51	40.587.881.898,42	473.506.102.510,51	452.573.230.719,27	452.573.230.719,27	452.573.230.719,27	(20.932.871.791,24)	(4,42)
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					473.506.102.510,51		514.073.984.398,93	452.573.230.719,27	127.147.758.688,42	579.720.989.807,69	65.947.005.208,76	12,77
1.02.	KESEHATAN	65.317.045.755,25	77.032.423.365,26	11.715.377.610,01	17,94	70.894.054.580,78	64.903.556.372,45	70.894.054.580,78	64.903.556.372,45	190.902.020.757,10	64.903.556.372,45	(5.990.496.208,33)	(8,45)
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	65.317.045.755,25	77.032.423.365,26	11.715.377.610,01	17,94	70.894.054.580,78	64.903.556.372,45	70.894.054.580,78	64.903.556.372,45	190.902.020.757,10	64.903.556.372,45	(5.990.496.208,33)	(8,45)
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	285.000.000,00	285.000.000,00			6.040.076.541,00	5.532.875.081,00	6.040.076.541,00	5.532.875.081,00		5.532.875.081,00	(507.201.460,00)	(8,40)
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	285.000.000,00	285.000.000,00			6.040.076.541,00	5.532.875.081,00	6.040.076.541,00	5.532.875.081,00		5.532.875.081,00	(507.201.460,00)	(8,40)
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	785.000.000,00	785.000.000,00			4.520.677.420,00	3.524.055.245,46	4.520.677.420,00	3.524.055.245,46		3.524.055.245,46	(996.622.174,54)	(22,05)
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	785.000.000,00	785.000.000,00			4.520.677.420,00	3.524.055.245,46	4.520.677.420,00	3.524.055.245,46		3.524.055.245,46	(996.622.174,54)	(22,05)
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					2.934.599.664,00	3.266.812.304,00	2.934.599.664,00	3.266.812.304,00		3.266.812.304,00	332.212.640,00	11,32
1.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					2.934.599.664,00	2.137.406.428,67	5.072.089.092,67	3.266.812.304,00	2.608.906.428,67	5.875.718.732,67	903.712.640,00	15,85

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
Kode	Uraian							Pembayaran			SILPA TAB		
								Penerimaan	Pengeluaran	Pembayaran		Netto	
1			2					3	4	5		6	

BUPATI SAMBAS,

td.

ATBAH ROMIN SUHALI

**PERMINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**Tahun Anggaran 2017**

1-1

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja						Bertambah / (Berkurang) Rp		%
		Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah/ (Berkurang) Rp	%	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan						
						Tidak Langsung Rp	Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp	Tidak Langsung Rp	Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp			
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14	
1.	URUSAN WAJIB BELANJAN DASAR	66.387.045.755,25	78.102.423.365,26	11.715.377.610,01	17,85	559.453.941.063,29	449.209.996.385,56	1.008.663.937.448,85	532.111.423.587,85	577.964.221.811,57	1.110.075.645.399,42	107.411.707.950,57	10,05	
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	3.328.000.000,00	3.328.000.000,00			22.328.418.821,00	63.447.315.534,06	85.775.734.355,06	16.218.690.872,04	77.966.930.734,66	94.185.621.606,10	8.409.887.251,04	9,80	
3.	URUSAN PILIHAN	673.500.000,00	673.500.000,00		6,42	22.121.490.879,06	52.563.279.730,94	74.684.770.609,94	18.352.677.131,71	58.225.627.330,94	76.578.204.462,65	1.893.433.952,71	2,54	
4.	URUSAN PENUNJANG	1.486.170.002.843,22	1.583.743.325.457,61	95.573.322.614,39	6,42	334.423.925.626,51	74.736.839.753,39	409.160.765.379,90	331.663.666.614,66	86.587.828.953,58	416.261.497.666,24	9.100.732.189,34	2,22	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.558.593.548.398,47</b>	<b>1.665.347.248.822,87</b>	<b>107.286.700.424,40</b>	<b>6,88</b>	<b>908.327.776.389,80</b>	<b>639.957.401.403,95</b>	<b>1.578.285.207.793,75</b>	<b>896.346.460.206,26</b>	<b>800.784.508.830,15</b>	<b>1.699.100.969.036,41</b>	<b>120.876.761.242,66</b>	<b>7,65</b>	

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHALI

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR 7 TAHUN 2017  
 TANGGAL 13 OKTOBER 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN SAMBAS  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Perjanjian Kredit No. 20 Tanggal 28 Desember 2011	Tanggal 28 Desember 2011	36.898.730.975,00	6 Bulan	13%	Membiayai Belanja Pelayanan Publik dan Penyediaan Layanan Umum	36.898.730.975,00	-	-	-
2	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Perjanjian Kredit No. 52 Tanggal 27 Desember 2012	Tanggal 27 Desember 2012	46.793.129.000,00	6 Bulan	13%	Membiayai Belanja Pelayanan Publik dan Penyediaan Layanan Umum	46.793.129.000,00	-	-	-
3	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Perjanjian Kredit No. 67 Tanggal 30 Desember 2013	Tanggal 30 Desember 2013	51.746.521.770,00	6 Bulan	13%	Membiayai Belanja Pelayanan Publik dan Penyediaan Layanan Umum	51.746.521.770,00	-	-	-
4	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Perjanjian Kredit No. 60 Tanggal 31 Desember 2014	Tanggal 31 Desember 2014	28.587.832.929,00	6 Bulan	13%	Membiayai Belanja Pelayanan Publik dan Penyediaan Layanan Umum	28.587.832.929,00	-	-	-
5	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Perjanjian Kredit No. 66 Tanggal 31 Desember 2015	Tanggal 31 Desember 2015	42.497.000.000,00	6 Bulan	13%	Membiayai Belanja Pelayanan Publik dan Penyediaan Layanan Umum	42.497.000.000,00	-	-	-
6	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat			54.239.000.000,00	5 Bulan	13%	Membiayai Belanja Pelayanan Publik dan Penyediaan Layanan Umum	54.239.000.000,00	-	-	-
Jumlah				260.762.214.674,00				260.762.214.674,00	-	-	-

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMKIN SUHALLI

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR 7 TAHUN 2017  
 TANGGAL 13 OKTOBER 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGATAN 2017

KABUPATEN SAMBAS  
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN  
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI  
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kode	Judul Kegiatan	Tahun Anggaran Tahun 2016		Jumlah Realisasi s/d akhir TA. 2016	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini TA. 2017	
			APBD TA. 2016	Perubahan APBD TA. 2016		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI SAMBAS,

tttd

ATBAH ROMIN SUHAILI